

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan sosial yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia adalah kemiskinan. Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai jumlah masyarakat paling banyak di Asia, maka terdapat beberapa permasalahan sosial yang dihadapi, salah satunya kemiskinan. (Suman, 2016). Kemiskinan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain menurunnya tingkat pendidikan, ketersediaan layanan kesehatan, dan permasalahan pekerjaan yang mana semua faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas hidup atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. (Ikhlas et al., 2023)

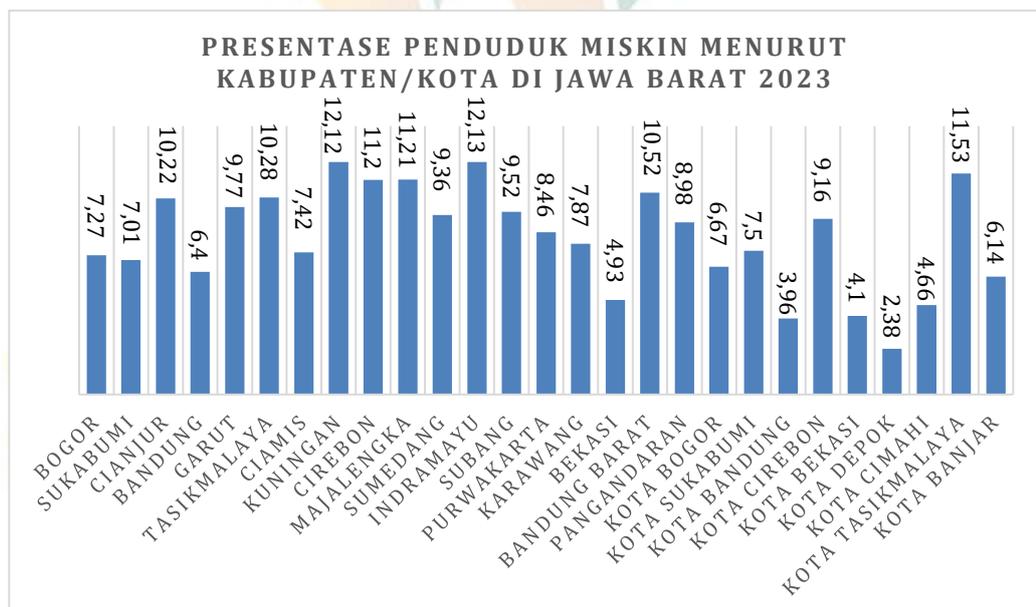
Kemiskinan merupakan salah satu cara untuk mengetahui berhasil atau tidaknya pembangunan suatu daerah. Kemiskinan sendiri terjadi karena kemampuan individu yang pada akhirnya menghalangi mereka untuk menjadi kontributor yang berharga bagi pembangunan ekonomi. Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan paling mendesak yang dihadapi suatu kawasan, bahkan suatu negara, dan berbagai tindakan terus dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. (Saputra, 2021)

Permasalahan yang timbul di negara-negara berkembang cukup nyata, namun di beberapa negara tersebut, kemajuan telah dicapai dalam bidang produksi dan pendapatan nasional. Kondisi kemiskinan suatu negara atau wilayah merupakan ukuran tingkat kesejahteraan manusia yang ada di negara atau wilayah tersebut. Indonesia masih merupakan negara berkembang, dan kemiskinan merupakan permasalahan yang banyak menyita perhatian. Untuk memahami permasalahan kemiskinan di Indonesia harus memperhatikan aktivitas sehari-hari yang terjadi di setiap daerah, yaitu kemiskinan pada tingkat tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah pada waktu tertentu. Pemecahan masalah dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih obyektif dan akurat. (Muhammad Farhan et al., 2023)

Istiandari., 2020 mengatakan di Indonesia, salah satu daerah yang mempunyai persentase penduduk miskin cukup tinggi adalah Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 dan 2021 berada di urutan ke-4 sebagai provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di pulau Jawa. Meningkatnya jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Barat mungkin menjadi penyebab meningkatnya jumlah penduduk miskin. Pemerintah pusat dan daerah selalu berupaya mengatasi masalah ini dengan menerapkan berbagai kebijakan dan program untuk mengurangi kemiskinan, namun hal ini merupakan sesuatu yang di luar kebiasaan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan tidak mencapai hasil yang diinginkan. Karena lebih merugikan program secara sektoral, banyak terjadi keengganan antara rencana dengan pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, perlu adanya strategi melalui program dan kebijakan yang efektif untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini agar lebih efektif dan terpadu sehingga dapat diselesaikan secara lugas. Masih banyak penduduk miskin di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Grafik 1.1

Jumlah Penduduk Miskin Jawa Barat (Persen) Tahun 2014-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat

Berdasarkan Grafik 1.1 di atas yang menunjukkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat, persentase penduduk miskin terbesar di

provinsi Jawa Barat terdapat di Kabupaten Indramayu sebesar 12,13%, sedangkan persentase terkecil terdapat di Kota Depok sebesar 2,38%. Sedangkan untuk Kabupaten Cirebon sendiri, persentase penduduk miskinnya masih cukup tinggi, yaitu sekitar 11,2%. Dikarenakan di Kabupaten Cirebon masih terdapat persentase penduduk miskin yang relatif cukup tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat sebesar 7,62%.

Pada skala regional, Provinsi Jawa Barat, termasuk Kabupaten Cirebon, masih menghadapi tantangan dalam menurunkan tingkat kemiskinan meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan. Kabupaten Cirebon, sebagai salah satu kabupaten dengan potensi ekonomi yang cukup besar, mengalami perkembangan ekonomi yang dinamis dari tahun ke tahun. Namun, tantangan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya tingkat pendidikan masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi daerah ini.

Kabupaten Cirebon, sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat, tidak terlepas dari permasalahan ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Cirebon sangat kompleks dan melibatkan berbagai variabel ekonomi dan sosial. Di antara faktor-faktor tersebut, upah minimum, tingkat pendidikan, dan pengangguran sering kali dianggap memiliki peran signifikan. (Fariza, 2020)

Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 mencapai 249,18 ribu orang (11,20 persen) menurun 16,92 ribu orang dibanding penduduk miskin tahun sebelumnya yang sebesar 266,1 ribu orang (12,01 persen). Garis kemiskinan Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 sebesar Rp 451.853 per kapita per bulan sementara pada tahun 2022 sebesar Rp 416.914. Periode 2022 ke 2023 terjadi kenaikan garis kemiskinan sebesar Rp 34.939 per kapita per bulan atau naik 8,38 persen.

Berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon mengalami variasi dari tahun ke

tahun. Data mengenai tingkat kemiskinan dari tahun 2014 hingga 2023 adalah sebagai berikut:

Grafik 1.2
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Cirebon (Persen)
Tahun 2014-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon

Berdasarkan data, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon mengalami dinamika yang cukup signifikan selama periode 2014 hingga 2023. Pada tahun 2014, tercatat sebanyak 300,5 ribu penduduk miskin, yang sempat meningkat menjadi 313,21 ribu pada 2015. Namun, angka tersebut menunjukkan tren penurunan di tahun-tahun berikutnya, seperti 279,60 ribu pada 2017 dan mencapai 217,64 ribu pada 2019. Penurunan ini dapat mencerminkan adanya upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan, tetapi fluktuasi yang terjadi menandakan bahwa isu kemiskinan masih menjadi tantangan yang kompleks di Kabupaten Cirebon.

Menurut (Prayoga et al., 2021) masalah kemiskinan melibatkan sejumlah faktor kompleks, termasuk tingkat pendidikan, tingkat penyerapan tenaga kerja, tingkat kesehatan yang rendah, ketidaksetaraan dalam sistem hukum, ketidakmampuan masyarakat untuk menemukan peluang hidup, peningkatan jumlah pengangguran yang tidak seimbang dengan pertumbuhan lapangan kerja, tingkat upah yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan kualitas hidup yang rendah bagi masyarakat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah upah minimum, kondisi upah di setiap wilayah Jawa Barat berbeda-beda dan di setiap kabupaten/kotanya. Upah yang sangat rendah dapat mengakibatkan kenaikan kemiskinan. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Penguasa atau pemberi kerja atas pekerjaan yang dilakukan dan dibayar menurut peraturan, ketentuan, atau syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan pekerjaan, seperti imbalan atas pekerjaan dan/atau tenaga kerja yang telah selesai atau akan diselesaikan. (Muhammad Farhan et al., 2023)

Upah minimum merupakan kebijakan yang dirancang untuk melindungi pekerja dari upah yang terlalu rendah. Peningkatan upah minimum pekerja akan meningkatkan daya beli mereka, yang pada akhirnya akan merangsang semangat kerja dan meningkatkan efisiensi kerja. Hal ini disebabkan karena di Indonesia banyak terjadi kemiskinan dan jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya, sedangkan lapangan pekerjaan yang disediakan pemerintah tidak sebanding dengan jumlah kemiskinan, sehingga selalu ada keterkaitan antara kemiskinan dan kemiskinan. Sebab, para penganggur tidak mempunyai penghasilan dan kerugian. (Millenia & Zaini, 2021)

Terdapat kegagalan pemerintah dalam pembangunan ekonomi, dan kegagalan pertumbuhan ekonomi hanya karena kemiskinan cenderung disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah secara umum dalam menganalisis berbagai perkembangan ekonomi. Ketika pemerintah mengubah sistem upah, sumber penghasilan adalah kuncinya. Jika sumber penghasilan turun atau tetap, maka kesejahteraan juga turun atau tetap, dan hal ini juga mempengaruhi tingkat kemiskinan. Para pekerja merupakan salah satu indikator utama pertumbuhan ekonomi masyarakat Kemiskinan. (Yudha, 2013).

Tabel 1.1
Upah Minimum Kabupaten Cirebon (Tahun 2014-2023)

Tahun	Upah Minimum
2014	Rp 1.212.750
2015	Rp 1.428.000

Tahun	Upah Minimum
2016	Rp 1.592.220
2017	Rp 1.723.578
2018	Rp 1.873.702
2019	Rp 2.024.160
2020	Rp 2.196.416
2021	Rp 2.269.557
2022	Rp 2.279.983
2023	Rp 2.430.781

Sumber: Disnaker Jawa Barat

Berdasarkan data dari tabel 1.1 upah minimum Kabupaten Cirebon Secara keseluruhan, upah minimum di Kabupaten Cirebon menunjukkan tren naik dari tahun 2014 hingga 2023. Ini menunjukkan adanya perhatian terhadap kesejahteraan pekerja berpenghasilan rendah. Kenaikan upah minimum yang konsisten dapat berdampak positif pada pengurangan angka kemiskinan, terutama bila diiringi dengan kebijakan pengendalian harga dan penciptaan lapangan kerja. Pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.212.750 mengalami peningkatan ditahun 2015 sebesar Rp. 1.428.000 dan rata-rata disetiap tahunnya upah minimum Kabupaten Cirebon meningkat. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di wilayah tersebut. Akan tetapi, upah minimum Kabupaten Cirebon masih tergolong kecil dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Barat, terutama kota-kota industri seperti Bekasi, Karawang, dan Bandung. Perbedaan ini mencerminkan adanya ketimpangan ekonomi antar daerah, yang dapat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan kesejahteraan pekerja. Dengan upah minimum yang relatif kecil, pekerja di Kabupaten Cirebon memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup layak, yang pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan angka kemiskinan.

Selain itu, Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Menurut Mankiw dalam penelitian yang dilakukan oleh (Pradipta & Dewi, 2020) menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu jenis investasi individu, dan jika meningkat maka tingkat kesejahteraan juga akan meningkat. Hal ini juga akan meningkatkan tingkat stabilitas perekonomian suatu negara di kawasan Panjang. Salah satu cara untuk mengetahui baik atau buruknya pendidikan di suatu daerah

adalah dengan melihat angka rata-rata lama sekolah. Dalam hal ini, rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengidentifikasi lulusan di suatu wilayah tertentu. Rata-rata lama sekolah sendiri adalah jumlah pendidikan yang diterima setiap orang melalui pendidikan formal.

Terlihat bahwa dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, investasi di bidang pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang maka semakin meningkat pula ilmu dan keahliannya, yang akan mendorong peningkatan efisiensi kinerja. Dalam rangka meningkatkan produktivitas, pendidikan dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketertinggalan di suatu daerah. (Millenia & Zaini, 2021)

Tabel 1. 1
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Cirebon
(Tahun 2014-2023)

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
2014	6,31
2015	6,32
2016	6,41
2017	6,61
2018	6,62
2019	6,72
2020	6,92
2021	7,1
2022	7,4
2023	7,64

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa Rata-rata lama sekolah Kabupaten Cirebon dalam sepuluh tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, berada di angka 6,31 dan meningkat sedikit setiap tahunnya hingga mencapai 6,41 pada tahun 2016. Pada tahun 2017, rata-rata lama sekolah meningkat menjadi 6,61 dan terus naik hingga 6,72

pada tahun 2019. Ini menunjukkan peningkatan yang lebih konsisten dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Mulai dari tahun 2020 hingga 2023, rata-rata lama sekolah meningkat cukup signifikan dari 6,92 tahun menjadi 7,64 tahun. Secara keseluruhan, data menunjukkan peningkatan yang positif dalam rata-rata lama sekolah (rls) di Kabupaten Cirebon dari tahun 2014 hingga 2023. Hal ini mengindikasikan adanya kemajuan dalam akses atau kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

Selain upah minimum, tingkat Pendidikan, pengangguran memiliki korelasi yang kuat dengan kemiskinan. Pengangguran yang tinggi menandakan kurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan dan daya beli, yang pada akhirnya memperburuk tingkat kemiskinan. Dalam sudut pandang makro ekonomi, pengangguran yang tinggi merupakan masalah. Salah satu gambaran dampak dari tingginya tingkat pengangguran adalah akan banyaknya sumber daya yang terbuang percuma dan pendapatan masyarakat berkurang. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang tercipta sebagai akibat pertambahan lapangan kerja yang lebih rendah dari pertumbuhan tenaga kerja. Akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan (Amalia et al., 2024).

Tingginya tingkat kemiskinan dapat secara efektif mengatasi permasalahan kemiskinan. Menurut teori ekonomi, kemiskinan menyoroti kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga atau individu. Hal ini mengacu pada faktor ekonomi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan, udara, perumahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi, dan kebutuhan lainnya. (Silvia Luthfiyah Ghinastri, 2024)

Secara makro ekonomi, tingginya tingkat kemiskinan merupakan sebuah permasalahan. Salah satu contoh dampak dari tingginya tingkat kemiskinan adalah melimpahnya sumber daya yang bersifat percuma dan berkurangnya pendapatan masyarakat. Pengangguran terbuka merupakan jenis pengangguran yang timbul akibat gangguan akibat kerja yang lebih parah dibandingkan gangguan akibat kerja. Di bidang ekonomi, semakin

banyak permasalahan terkait pekerjaan yang tidak terselesaikan oleh pekerja.(Amalia et al., 2024)

Grafik 1.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Cirebon
(Tahun 2014-2023)



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon, 2023

Data pengangguran terbuka di Kabupaten Cirebon dari 2014 hingga 2023 menunjukkan tren penurunan dengan beberapa fluktuasi. Pada 2014, tingkat pengangguran terbuka tercatat tertinggi di angka 13,32%, kemudian secara bertahap menurun menjadi 9,61% pada 2017. Namun, pada 2018, pengangguran terbuka sedikit meningkat ke 10,64% sebelum kembali turun ke 10,35% di 2019. Dampak pandemi COVID-19 tampak pada 2020 dengan peningkatan pengangguran terbuka menjadi 11,52%, diikuti penurunan ke 10,38% pada 2021 saat kondisi ekonomi mulai membaik. Pada 2022 dan 2023, dan terus menurun secara signifikan hingga mencapai 8,11% dan 7,65%, yang merupakan titik terendah dalam periode ini. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan adanya tren penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Cirebon, terutama setelah pemulihan dari dampak pandemi.

Meskipun ketiga variabel tersebut yaitu upah minimum kabupaten, tingkat pendidikan, dan pengangguran dalam penelitian ini menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya yaitu mengalami peningkatan dan penurunan, tapi hal tersebut tidak dapat menjadikan Kabupaten Cirebon bisa menurunkan tingkat kemiskinannya.

Banyak penelitian sebelumnya menemukan hasil yang beragam mengenai dampak pengangguran dan pendidikan terhadap kemiskinan. Misalnya saja penelitian yang dilakukan oleh (Amalia et al., 2024) menyimpulkan bahwa upah minimum dan pendidikan negatif tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sementara tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan, di mana kenaikan pengangguran meningkatkan jumlah penduduk miskin. Berbeda dengan (Fadillah, 2016) variabel pendidikan memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian lain (Muhammad Farhan et al., 2023) menunjukkan pendidikan, upah minimum dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian lain (Millenia & Zaini, 2021) mengungkapkan upah minimum dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan,

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan terdapat permasalahan bahwa upah minimum, rata-rata lama sekolah, dan pengangguran belum bisa ditentukan pengaruhnya terhadap kemiskinan. Untuk itu penulis mengangkat penelitian ini dengan judul: **“Pengaruh Upah Minimum, Rata-rata Lama Sekolah, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2023”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, permasalahan penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih berada pada angka yang cukup tinggi. Data BPS mencatat bahwa angka kemiskinan pada

tahun 2023 mencapai sekitar 10,52%, meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

- b. Upah Minimum Kabupaten Cirebon meningkat setiap tahun. Namun peningkatan tersebut belum diikuti dengan penurunan signifikan terhadap angka kemiskinan.
- c. Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Cirebon meningkat dari 6,31 tahun pada 2014 menjadi 7,64 tahun pada 2023, namun masih berada di bawah batas minimal 9 tahun pendidikan dasar yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- d. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Cirebon menunjukkan fluktuasi dan dalam beberapa tahun terakhir masih cukup tinggi.
- e. Meskipun variabel upah minimum kabupaten, rata-rata lama sekolah, dan pengangguran menunjukkan tren positif setiap tahunnya akan tetapi belum sepenuhnya berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan yang signifikan di Kabupaten Cirebon.Cirebon.

2. Batasan Masalah

Banyak sekali hal yang menyebabkan kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti memberikan batasan ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan. Peneliti hanya akan membatasi masalah dengan hanya dengan mengangkat permasalahan mengenai Pengaruh Upah Minimum Kabupaten, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengangguran terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Cirebon. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu Upah Minimum, Rata-rata Lama Sekolah Dan Pengangguran sebagai variabel X (Independent) dan terhadap Terhadap Kemiskinan sebagai variabel Y (dependen). Dalam penelitian ini peneliti juga membatasi rentang waktu data yakni hanya mengambil data dari tahun 2014-2023.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat pengaruh upah minimum kabupaten terhadap kemiskinan di Kabupaten Cirebon tahun 2014-2023?
- b. Apakah terdapat pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan di Kabupaten Cirebon tahun 2014-2023?
- c. Apakah terdapat pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Cirebon tahun 2014-2023?
- d. Apakah terdapat pengaruh upah minimum kabupaten, rata-rata lama sekolah, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2023.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh upah minimum kabupaten terhadap kemiskinan di Kabupaten Cirebon tahun 2014-2023.
- b. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan di Kabupaten Cirebon tahun 2014-2023.
- c. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2023.
- d. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh upah minimum kabupaten, rata-rata lama sekolah, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2023.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah berikut:

- a. Bagi Akademik Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pemikiran ilmiah dan mampu perbandingan teori dan prakteknya dalam masalah kemiskinan.

- b. Bagi Peneliti Sebagai pendalaman pengetahuan materi yang didapat di perkuliahan dengan menerapkannya pada penelitian ini.
- c. Bagi Pemerintah Menjadi informasi bagi pemerintah daerah untuk membuat keputusan dalam pengeluaran pemerintah untuk memaksimalkan kontribusi dimana berdampak pada kemiskinan.

D. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri dari lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang akan dipaparkan pada bab ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab menjelaskan dari teori-teori yang diambil sebagai topik pembahasan pada penelitian ini yang berisi upah minimum kabupaten (umk), rata-rata lama sekolah, pengangguran terhadap kemiskinan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini merupakan bab mengenai penguraian cara atau proses penelitian yang dilakukan, isi dari bab ini terdiri dari pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sample, operasional variabel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan juga pembahasan. Tujuan adanya bab ini untuk penyajian hasil analisis. Perbandingan dan pembahasan-pembahasan temuan yang sudah dilakukan oleh penulis.

BAB V PENUTUP

merupakan penutup dari penelitian yang dilakukan, terdiri dari hasil analisis masalah dalam penelitian dan saran dari hasil temuan penelitian.